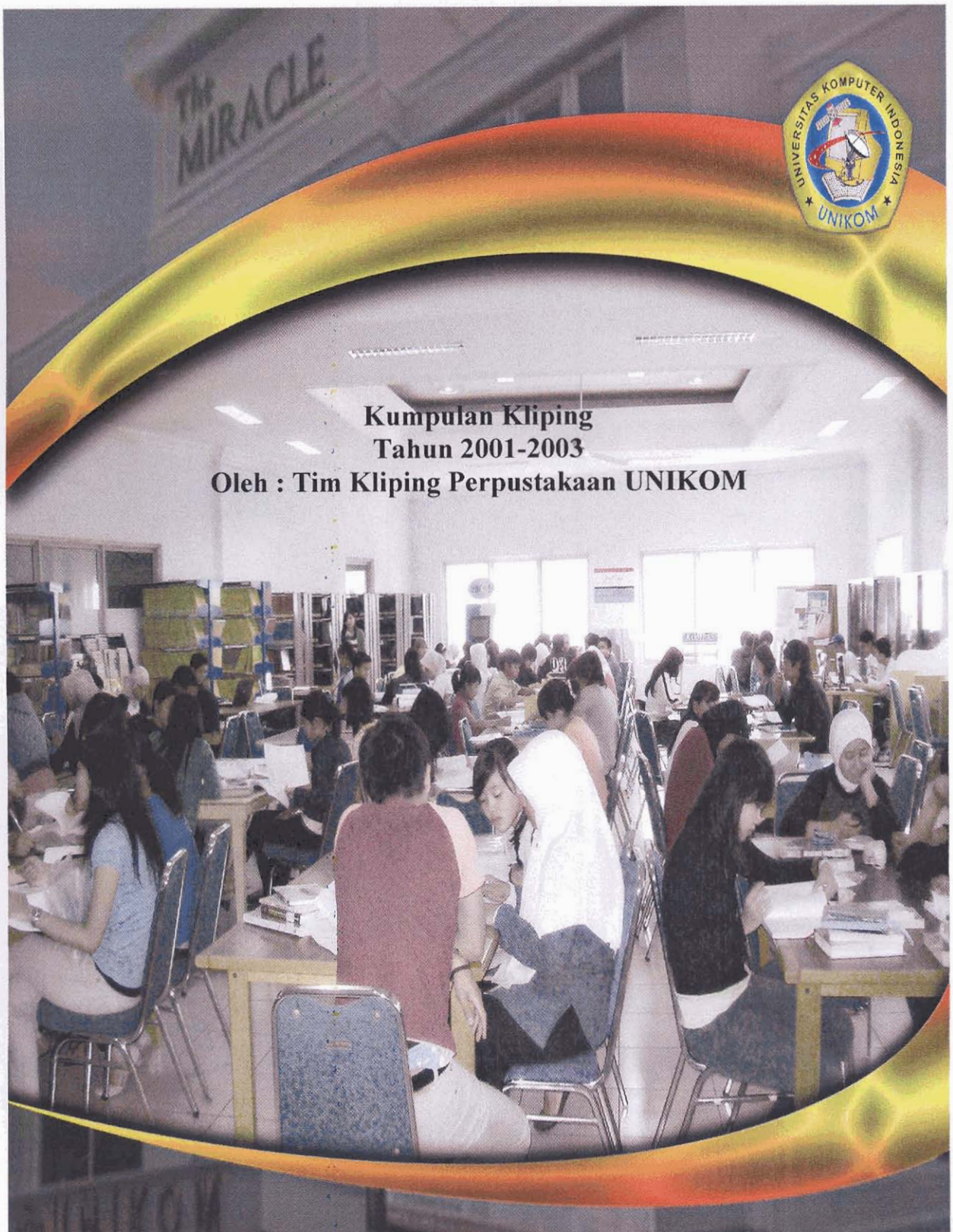


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 20 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 8 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / TIO KLASS : WAWACAN NUSANTARA / 352.5981

Kabupaten Kepulauan Riau

"HANYA Ada Satu Kata, Provinsi Kepri Harus Terwujud". Kalimat itu tertuang dalam salah satu spanduk yang terpasang di sudut ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri). Kalimat lain yang bernada mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam berbagai spanduk yang tergelar di tempat lain yang strategis.

JIKA ibu kota kabupaten marak dengan spanduk, liputan di pelbagai media massa pun ramai dengan berita dari kabupaten ini. Kabar yang muncul kali ini bukan karena ulah tetangganya, Singapura, yang diketahui gemar membuang limbah hasil industrinya ke beberapa daerah di kabupaten tersebut. Bukan pula kontroversi tentang penggalian besar-besaran pasir darat yang kemudian dijual ke negara tetangga itu untuk reklamasi wilayahnya. Yang menjadi bahan berita, apalagi kalau bukan keinginan kabupaten ini untuk meningkatkan status wilayahnya menjadi provinsi serta pro dan kontra yang menyertainya.

Saat ini Kabupaten Kepri adalah bagian dari Provinsi Riau. Dibandingkan dengan 15 kabupaten/kota lainnya yang termasuk dalam provinsi ini, kondisi geografis Kepri bisa dikatakan unik. Luas seluruh wilayah sedikitnya mencapai 101.000 kilometer persegi. Dalam wilayah itu terdapat 513 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni baru 135 buah. Seluruh pulau tersebar di perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Untuk menghitung pulau sebanyak itu, konon diperlukan lada sebanyak segantang. Karena itulah Kepri mendapat julukan "bumi segantang lada".

Luas lautan Kepri sekitar 95 persen dari seluruh luas wilayah. Berarti daerah ini memiliki potensi kekayaan laut sebagai aset yang dapat diandalkan. Namun sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dari lapangan usaha pertanian—yang di dalamnya termasuk usaha di bidang perikanan—kontribusi yang diberikan pada seluruh kegiatan ekonomi kabupaten pada tahun 2000 hanya 7,95 persen atau Rp 141,6 milyar. Jika dibandingkan dengan kontribusi dari delapan kegiatan usaha lain, bidang usaha ini menempati posisi kelima.

Pada tahun itu, dengan 8.864 unit kapal atau perahu penangkap ikan yang beroperasi diperoleh 35.800 ton produksi ikan laut. Nilainya sekitar Rp 212 milyar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 1999, volume produksi itu naik 35,5 persen. Dari seluruh produksi, sedikitnya 7.000 ton ikan ditangkap di perairan Senayang dan tidak kurang dari 6.000 ton dari Bintan Timur. Perolehan dari kecamatan lainnya rata-rata kurang dari 5.000 ton.

Di samping perikanan, agrobisnis juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi investasi yang menguntungkan. Di Kecamatan Lingga, misalnya, tersedia lahan 2.000 hektar untuk peternakan sapi. Selain itu juga tersedia 2.000 hektar untuk pengembangan buah-buahan dan 20 hektar untuk sayur-sayuran. Di Kecamatan Bintan Timur disediakan lahan peternakan babi seluas 30.000 hektar.

Kepri termasuk wilayah yang kaya akan sumber daya tambang. Dalam perut buminya, tersimpan bauksit, timah, dan granit. Hasil penambangan bauksit yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang, diekspor sekitar 1,3 ton dengan nilai 13,7 juta dollar AS. Sementara PT Timah Tbk menambang timah di Kecamatan Singkep. Sama seperti perikanan, potensi pertambangan yang ada belum termanfaatkan. Secara keseluruhan usaha pertambangan dan penggalian, khususnya penggalian pasir darat yang dikelola oleh 35 perusahaan, menghasilkan sekitar Rp 192 milyar.

Penggerak roda ekonomi Kabupaten Kepri adalah usaha di bidang industri pengolahan. Kegiatan usaha ini menghasilkan sedikitnya Rp 460 milyar. Nilai yang diperoleh ini memberikan sumbangan tidak kurang dari 25,8 persen bagi seluruh kegiatan ekonomi di tahun 2000 yang berjumlah sekitar Rp 1,8 trilyun.

Kawasan Industri Lobam di Pulau Bintan telah menyerap 34 unit usaha dengan 10.564 warga. Di pulau seluas 2.185,6 kilometer persegi telah dicadangkan lahan industri seluas 4.000 hektar. Meskipun lahan yang telah dibebaskan 96,2 persen, namun baru 300 hektar yang dimanfaatkan untuk 18 industri elektronik, 14 industri garmen, dan dua aneka industri. Kawasan Industri Lobam merupakan salah satu wujud dari kerja sama ekonomi terpadu Sijori (Singapura, Johor dan Riau) yang dijalin antara Indonesia (Riau) dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia (Johor).

Sampai tahun 2000, di Kabupaten Kepri terdapat 67 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi (yang ditanam) sekitar Rp 4,9 trilyun. Bidang usaha perusahaan ini antara lain industi pengolahan hasil perkebunan karet, industri konveksi, dan industri bunga imitasi. Seluruh perusahaan ini menyerap 59.716 tenaga kerja negeri sendiri dan 311 tenaga kerja asing.

Sementara dari 93 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diperoleh investasi 2,3 juta dollar AS. Perusahaan PMA itu antara lain bergerak di bidang usaha industri kayu dan plywood, industri pakaian jadi, industri komponen elektronik, serta industri barang dari semen untuk konstruksi. Sebanyak 37.000 pekerja dalam negeri dan sekitar 1.000 tenaga kerja asing terserap dalam perusahaan ini.

Selain kerja sama mengelola kawasan industri Lobam, bentuk kerja sama yang lain adalah mengelola Kawasan Pariwisata Terpadu di Bintan Utara. Daerah wisata itu dikenal dengan nama Kawasan Wisata Lagoi dengan luas areal 23.000 hektar. Dari sekitar 87 persen lahan yang telah siap dimanfaatkan, saat ini pada lahan se-

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

luas 3.000 hektar berdiri tujuh hotel bertaraf internasional, berikut empat lapangan golf. Dua lapangan golf memiliki 36 *hole*, sisanya 18 *hole*. Seluruh lapangan golf di tempat ini merupakan hasil rancangan bintang golf dunia, antara lain Jack Nicklaus.

Lagoi yang diresmikan 18 Juni 1996 oleh Presiden Soeharto bersama dengan PM Singapura Goh Chok Tong, diklaim mampu menjaring 40.000 wisatawan mancanegara setiap bulan. Terbanyak dari Singapura. Dengan menggunakan feri, jarak 45 kilometer yang memisahkan kedua daerah ini dapat ditempuh dalam waktu 45 menit.

Pesona lapangan golf dan keindahan pasir putih pantai Lagoi yang mengundang wisatawan mancanegara memberikan tambahan pendapatan bagi kas Kepri sedikitnya Rp 24 milyar setahun. Sayangnya lokasi wisata ini hanya ditujukan bagi kalangan berduit. Biaya wisata semuanya bertarif dollar, baik dollar Singapura maupun dollar AS. Tarif itu tentu tidak terjangkau oleh penduduk Bintan sendiri. Alhasil, penduduk Bintan bagaikan orang asing di rumah sendiri. Mereka tidak bisa menikmati keindahan alam berupa bentangan pasir putih di sepanjang pantai yang menghadap ke Laut Cina Selatan itu.

[redacted] (BE JULIANERY, *Litbang Kompas*).

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat /~~ .....
Penulis : .....
Subjek : .....

KABUPATEN KEPULAUAN RIAU



Nama daerah : Kabupaten Kepulauan Riau
Ibu kota : Tanjung Pinang
Provinsi : Riau
Batas wilayah
- **Utara** : Kabupaten Natuna dan Malaysia Timur
- **Selatan** : Provinsi Bangka Belitung, Indragiri Hilir dan Provinsi Jambi
- **Barat** : Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Singapura
- **Timur** : Kabupaten Natuna dan Provinsi Kalimantan Barat

Luas wilayah
- **Daratan** : 4.303,35 km^2
- **Lautan** : 96.866 km^2

Jumlah penduduk : 319.512 jiwa (Sensus Penduduk 2000)
Jumlah kecamatan : 9 kecamatan
Dana Alokasi Umum 2002 : Rp 95,51 milyar

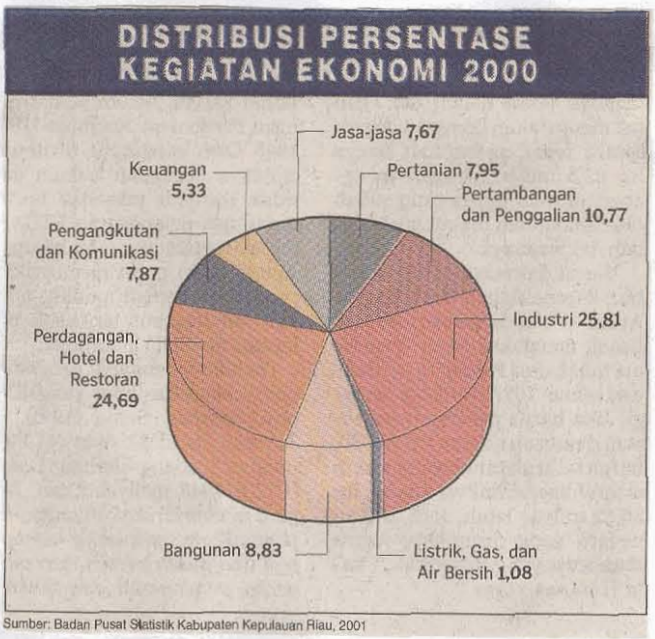
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

NO	KECAMATAN	LUAS (km^2)	PENDUDUK	
			JUMLAH	KEPADATAN
1	Singkep	829,00	36.918	45
2	Lingga	892,72	22.639	25
3	Senayang	396,00	16.795	42
4	Teluk Bintan	185,00	7.684	42
5	Bintan Utara	627,59	38.663	62
6	Bintan Timur	964,12	54.196	56
7	Tambelan	169,42	5.261	31
8	Tanjung Pinang Barat	70,50	52.773	749
9	Tanjung Pinang Timur	169,00	84.583	500
	Total	4.303,35	319.512	74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Riau, 2001

BESTARI

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../1-3/.....
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



SEJAK otonomi daerah diberlakukan, salah satu kabupaten yang elite politik lokalnya terus-menerus dilanda konflik adalah Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri), Provinsi Riau. Setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengangkat Huzrin Hood dan Ansar Ahmad masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepri periode 2000-2005, pada 28 November 2000, hubungan antara legislatif dengan eksekutif pun tak harmonis.

DPRD Kepri menilai, pengangkatan Huzrin dan Ansar tidak sah. Alasannya, 29 dari 45 anggota DPRD yang ikut memilih pada 23 Oktober 2000, 15 anggota tidak representatif mengikuti pemilihan. Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 492/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000, ke-15 anggota tersebut dipindah ke Kabupaten Karimun dan Natuna.

Apalagi Kawat Mendagri Nomor 131/2164/SJ tanggal 18 September 2000 menginstruksikan DPRD Kepri menunda pemilihan bupati sampai terisi pergantian antarwaktu. Namun, Huzrin yang menjabat Ketua DPRD Kepri melangsungkan pemilihan hingga ia terpilih bersama Ansar.

Atas pengangkatan Mendagri terhadap Huzrin dan Ansar tanggal 28 November 2000, sebelumnya DPRD mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Kepri Nomor 53/KPTS/DPRD/2000 tanggal 28 Oktober yang menolak hasil pemilihan. Lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui ketuanya, Tawarich, yang kebetulan calon bupati ketika itu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan pengangkatan Huzrin dan Ansar. Tawarich menggugat selaku calon bupati yang dirugikan karena tidak hadir dalam pemilihan akibat adanya kawat Mendagri yang minta pemilihan ditunda.

Gugatan Tawarich terhadap Mendagri dimenangkan PTUN Jakarta sampai putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Mendagri melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang hingga kini belum ada putusannya.

◆◆◆

APA dampak semua itu ?

Selama Huzrin memimpin Kepri, tak pernah hadir dalam sidang pengambilan keputusan penting di daerah itu. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Rivai Siregar. Pembentukan peraturan daerah (perda) yang jumlahnya 40-an, semuanya diwakili Sekda.

Itu bisa terjadi karena DPRD tak mengakui keberadaan Huzrin dan Ansar sebagai bupati dan wakil bupati Kepri. Tentu saja ada kerancuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kepulauan itu. Bahkan, terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) Huzrin atas penggunaan APBD 2001, DPRD menolak untuk membahasnya. LPJ disampaikan ke Mendagri karena yang mengangkat Huzrin sebagai bupati Kepri adalah Mendagri, bukan atas dasar pemilihan DPRD.

Karena secara kebetulan Huzrin dalam musyawarah besar rakyat Kepri di Tanjung Pinang pada 15 Mei 1999 ditunjuk sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), praktis aktivitas selaku bupati terbelah dua. Di satu sisi Huzrin bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kepri, di sisi lain ia harus melaksanakan amanah warga Kepri memperjuangkan "bumi segantang lada" ini menjadi provinsi.

Boleh dikatakan, hampir separuh aktivitas Huzrin di Jakarta memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepri. Tidak jarang urusan pemerintahan pun dikendalikan dari Jakarta. Soal uang yang digunakan memperjuangkan Provinsi Kepri, kepada *Kompas* Huzrin mengaku berasal dari sumbangan masyarakat Kepri.

Meski demikian, bukan berarti pemerintahan di Kepri terhenti. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan seperti biasa, diwakilkan kepada Sekda Kepri. Tentu saja DPRD sulit mengontrol eksekutif. Terbukti, DPRD tak bersedia membahas LPJ bupati dengan alasan tak pernah mengakui keabsahannya.

"Padahal, langkah politik DPRD yang tak mau membahas APBD merugikan rakyat Kepri," kata Zamzami A Karim, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang.

◆◆◆

UNTUNGLAH ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan temuan penggunaan dana APBD 2001 sampai April 2002, sehingga praktik dugaan penyimpangan penggunaan dan penerimaan APBD muncul ke permukaan. Dalam laporan BPK Nomor 31/S/XIV.1/7/2002 tertanggal 3 Juli 2002, dari Rp 315 milyar APBD 2001, terdapat Rp 84 milyar lebih uang yang diduga diselewengkan, penerimaan maupun penggunaannya.

Penggunaan keuangan untuk pos biaya tak tersangka untuk hal-hal mendesak, tak pernah dikoordinasikan dengan DPRD. Tapi, oleh eksekutif dikeluarkan Rp 7,2 milyar yang di dalamnya terdapat biaya penerimaan pejabat di Tanjung Pinang Rp 2,8 milyar. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 30 disebutkan, penggunaan anggaran tidak terduga harus diberitahukan kepada DPRD.

Bahkan, berdasar temuan BPK, Huzrin sebagai bupati menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) 84 kali senilai Rp 24,761 milyar, sebelum APBD disahkan. Surat Perintah

Perpustakaan Unikom

Membayar Uang (SPMU) didelegasikan kepada Kepala Bagian Keuangan Said Usman. Dari uang tersebut, Rp 16,225 milyar digunakan untuk biaya operasional yang bukan keperluan gaji tunjangan dan keperluan listrik, telepon, maupun air.

Atas temuan BPK, Huzrin mempersilakan aparat terkait mengusut tuntas sesuai prosedur hukum. "Silakan saja periksa. Tapi, jangan memvonis. Untuk diketahui, saya tak pernah menggunakan uang APBD ini untuk kepentingan pribadi," kata Huzrin.

Melihat konflik elite lokal di Kabupaten Kepri ini, sudah saatnya pertikaian eksekutif dan legislatif diakhiri. Konflik elite lokal yang merugikan rakyat tidak lagi dikehendaki. MA diimbau segera menurunkan putusan demi terciptanya kepastian hukum, sah atau tidaknya Huzrin dan Ansar selaku bupati dan wakil bupati Kepri.

(SURYA MAKMUR NASUTION)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 8 / 1-8
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : WAWASAN NUSANTARA / 352.5981

Kabupaten Bengkalis

PREDIKAT kabupaten terkaya di Provinsi pernah dan masih akan disandang Kabupaten meski wilayahnya berkurang 62 persen. Ini dikarenakan kekayaan minyak bumi, yang sekaligus menjadikannya penghasil minyak terbesar kedua di Indonesia setelah Kabupaten Kutai. Selain itu, karena usaha perkayuan.

SEBELUM tahun 1999, luas wilayah Kabupaten Bengkalis 30.646,83 kilometer persegi. Pemekaran wilayah menjadi tiga kabupaten dan satu kota menyebabkan luasnya tinggal 11.481,77 kilometer persegi. Sejumlah aset ekonomi daerah pun dibagi-bagi.

Kekayaan ladang minyak di Blok Coastal Plains Pekanbaru (CPP) menjadi milik Kabupaten Siak yang saat ini pengelolaannya beralih dari PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) ke pemerintah kabupaten (pemkab) bekerja sama dengan Pertamina. Sementara daerah penghasil ikan ternama, Bagansiapi-api, menjadi hak Kabupaten Rokanhilir. Kota Dumai yang memiliki industri pengilangan minyak juga membawa dan mengelola sendiri infrastruktur pelabuhan laut utama yang selama ini mendukung aktivitas distribusi barang antarpulau dan ke luar negeri.

Namun demikian, Bengkalis masih memiliki ladang minyak potensial di daerah sendiri, yakni Duri (Kecamatan Mandau) dan Kecamatan Merbau. Dari ladang-ladang tersebut, produksi minyak mentah di Bengkalis yang operasionalnya sebagian besar dilakukan PT CPI tercatat 295.000 barrel per hari. Produksi migas Riau 455.000 barrel per hari, sebagian besar disumbang oleh Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Siak yang mengelola Blok CPP dengan kemampuan produksi 40.000 barrel per hari, hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap produksi keseluruhan.

Selain mengandalkan minyak, dilihat dari struktur Produk Domestik Regional Daerah (PDRD) tahun 2000 tanpa memperhitungkan migas, hasil sektor pertanian diharapkan dapat mengimbangi peran sektor pertambangan. Bila kegiatan ekonomi daerah lain mulai bergeser dari pertanian ke industri pengolahan, dari primer ke sekunder dan tersier, Bengkalis malah sebaliknya, berkeinginan memacu hasil pertanian. Hal ini bisa dimaklumi karena kekayaan hasil tambang tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan penduduk.

Dari pertanian, dinamika perkembangan produksi kehutanan dan tanaman bahan makanan memberi sumbangan cukup besar terhadap kegiatan perekonomian daerah. Bengkalis memiliki hutan produksi 322.931,46 hektar atau 48,25 persen dari luas hutan. Terdapat sekurangnya 13 perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). Produksi kayu dari izin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan Dinas Kehutanan tahun 2001 sebanyak 1.127.209 meter kubik dalam bentuk kayu bulat, kayu bulat kecil, dan bahan baku serpih.

Selanjutnya, setidaknya terdapat sembilan perusahaan besar industri pengolahan kayu seperti *moulding* (pembuatan kusen pintu/jendela). Pemasaran kayu olahan ini ke luar pulau dan luar negeri (Malaysia, Singapura, dan Cina) dilakukan antara lain melalui Pelabuhan Bengkalis, Selat Panjang, dan Sungai Pakning. Nilai ekonomi yang dihasilkan industri ini—termasuk industri hasil pertanian—Rp 3,6 trilyun tahun 2000.

Di lihat dari tanaman bahan makanan, produksi padi sawah dan ladang tergolong besar, namun bukan yang terbesar. Produksi terbesar diperoleh dari tanaman sagu. Produksi padi setelah pemekaran wilayah tahun 1999 tercatat 50.581 ton dari luas panen 14.319 hektar, dan tahun 2000 sebanyak 33.366 ton dari luas panen 13.631 hektar. Jumlah ini turun hampir 75 persen dibanding masa sebelum pemekaran wilayah.

Sementara produksi tanaman sagu 424.748 ton pada tahun yang sama. Luas areal sekitar 17.000 hektar tersebar di Kecamatan Tebing Tinggi, Merbau, Rangsang, Bengkalis, dan Bukit Batu.

Kegiatan kehutanan dan tanaman bahan makanan sebenarnya merupakan kontributor kedua dan ketiga terbesar dalam hitungan PDRD tahun 2000, masing-masing menyumbang 17,68 dan 10,73 persen. Perkebunan dengan komoditas karet, kelapa, dan kelapa sawit juga merupakan andalan perekonomian daerah.

Kontributor utama adalah perdagangan yang menguasai 30,19 persen atau senilai Rp 490,5 milyar. Kegiatan perdagangan di sini digerakkan oleh sekitar 1.800 pedagang yang tergolong besar dan menengah, serta 5.375 pedagang kecil/eceran. Komoditas perdagangan yang banyak dijumpai terkait dengan usaha industri pengolahan kayu, hasil pertanian, dan barang konsumsi ru-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

mah tangga.

Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki, dapat dipastikan Bengkalis mampu mempertahankan citranya sebagai daerah terkaya di Riau. Bila reputasi migas selama ini tidak mampu mengangkat kesejahteraan penduduk, siapa tahu sebaliknya melalui kegiatan dan hasil pertanian.

(GIANIE/ *Litbang* Kom

KABUPATEN BENGKALIS



Nama daerah	: Kabupaten Bengkalis
Ibu kota	: Bengkalis
Provinsi	: Riau
Batas wilayah	
Utara	: Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir
Selatan	: Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak
Barat	: Kabupaten Rokan Hulu
Timur	: Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Riau
Luas wilayah	: 11.481,77 km²
Jumlah penduduk	: 520.241 jiwa (Sensus Penduduk 2000)
Jumlah kecamatan	: 11
Dana Alokasi Umum 2002	: Rp 206,72 milyar

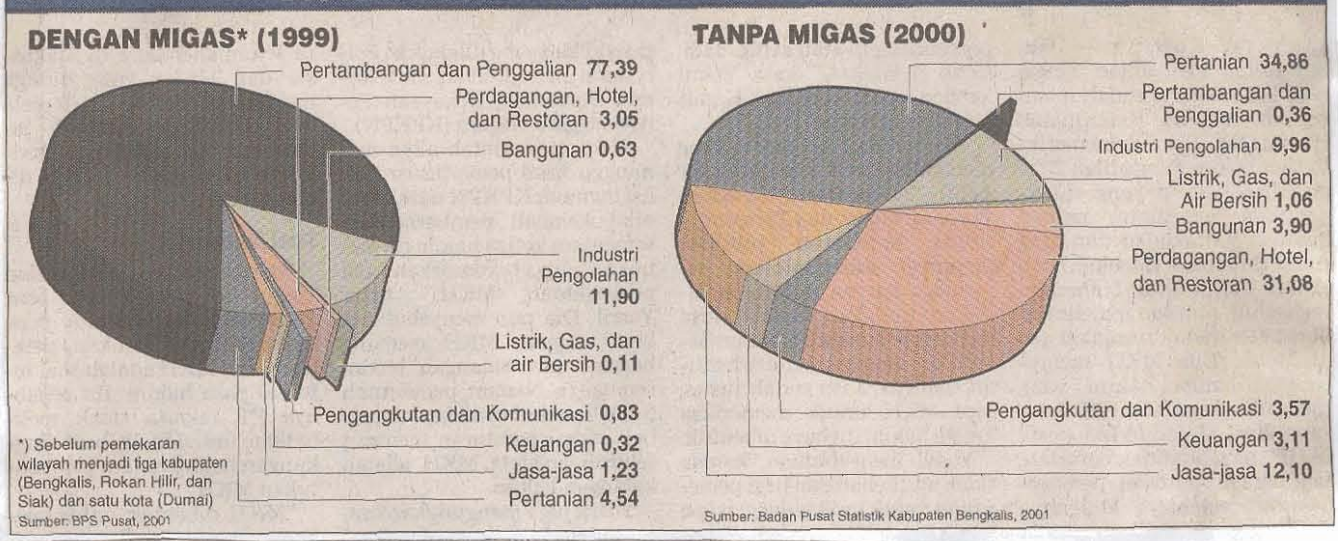
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

	KECAMATAN	LUAS (km²)	PENDUDUK	
			JUMLAH	KEPADATAN
1	Mandau	3.440,47	195.762	57
2	Bukit Batu	1.870,21	35.572	19
3	Rupat	896,35	25.922	29
4	Rupat Utara*	628,50	8.643	14
5	Bengkalis	514,00	56.515	110
6	Bantan	424,40	31.692	75
7	Merbau	1.348,91	42.096	31
8	Rangsang	681,00	24.324	36
9	Rangsang Barat*	241,60	24.573	102
10	Tebing Tinggi	849,50	62.351	73
11	Tebing Tinggi Barat*	586,83	12.791	22
	TOTAL	11.481,77	520.241	45

Sumber: Litbang *Kompas*, diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2002
* Tambahan kecamatan pemekaran sejak Mei 2001 melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

DISTRIBUSI PERSENTASE KEGIATAN EKONOMI



Seperti Harus Mulai dari Nol

MEMBANDINGKAN keberhasilan pembangunan pada masa era otonomi daerah dengan sebelumnya memang terasa tidak adil. Dengan berbagai kekurangan, terutama pada perangkat hukum, otonomi daerah dilakukan belum sampai dua tahun, sedangkan masa sebelumnya telah begitu lama mencengkram pembangunan Indonesia di mana saja termasuk di Kabupaten Bengkalis. "Kami seolah-olah harus mulai dari nol," kata Wakil Bupati Bengkalis Riza Pahlevi.

Sebagai penghasil devisa negara karena kekayaan alamnya, Bengkalis juga seperti daerah lain, tidak menerima apa-apa dari kekayaan alam tersebut. Riau saja yang pada tahun 1997 menghasilkan Rp 17 trilyun, hanya memperoleh dana pembangunan sekitar Rp 350 milyar dan tentu saja semakin kecil yang diterima Bengkalis. Tapi dengan otonomi daerah, Bengkalis tahun lalu mematok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir Rp 1 trilyun, sedangkan untuk tahun 2002 hampir Rp 1,4 trilyun.

Riza dalam suatu pembicaraan mengaku saat ini pembangunan di Bengkalis lebih banyak pada sektor fisik. Pasalnya, daerah ini memang kekurangan sarana dan prasarana. Di Kecamatan Rangsang, contohnya, tidak ada gedung pemerintah, sehingga enam unit perkantoran dibangun di kota itu.

Begitu juga menyangkut pembangunan bidang transportasi. Selain menggerakkan kapal fery antara Pulau Bengkalis-Sumatera, beberapa fery lagi segera dibangun. Jalan antarkampung di sejumlah pulau juga menjadi perhatian. Tak ketinggalan pembangunan tiga rumah sakit di Duri, Selatpanjang, dan Bengkalis. Selain itu, pelabuhan untuk rute Bengkalis-Muar (Malaysia).

"Kami akan terus membangun sarana semacam itu," kata Riza seraya menambahkan, tentu saja pada dua atau tiga tahun mendatang porsi fisik itu senantiasa berkurang karena telah mampu dibangun atau diperbaiki. Perbaikan gedung sekolah karena ribuan ruang belajar rusak misalnya, tiga tahun lagi sudah dapat dituntaskan.

Meskipun demikian, berbagai program nonfisik juga dilakukan. Pembangunan perkebunan terus digairahkan, sehingga di Pulau Bengkalis, misalnya, mulai dikerjakan tidak kurang dari 10.000 hektar sawit. "Beberapa pulau juga besar kemungkinan dikembangkan untuk perkebunan maupun jenis pertanian lainnya karena masa depan Bengkalis terletak juga pada pertanian," kata seorang tokoh masyarakat setempat yang beberapa bulan lalu dilantik menjadi anggota DPRD Riau dalam program penggantian antarwaktu, Helmi Mat.

◆◆◆

CARA yang ingin digapai itu menyebabkan Bengkalis tidak mungkin menutup mata dari kehadiran investor karena menggerakkan ekonomi kerakyatan yang menyeluruh, amat memerlukan jaringan usaha yang dimiliki investor. Malaysia menjadi orientasi karena gerakan investasinya di tengah ekonomi yang cukup baik, juga memerlukan apa yang dikerjakan masyarakat Bengkalis. Apalagi dipandang dari segi sosial budaya dan kenyataan masyarakat Bengkalis lebih dekat ke Malaysia dibanding daerah lain.

Memang, Malaysia kekurangan bahan baku nenas dan Bengkalis memiliki kawasan yang cukup luas untuk tanaman itu, sementara warga Bengkalis sudah sejak lama menanam nenas. "Kami upayakan menarik investor Malaysia untuk mengembangkan nenas sampai menjadi industri makanan. Begitu juga kelapa yang produksinya 11 juta butir per tahun, harus diberi nilai tambah yang dapat dibantu oleh investor," ujar Bupati Bengkalis Syamsurizal.

Nyatanya, banyak potensi Bengkalis yang bisa dikembangkan dan berkaitan dengan masyarakat banyak. Lahan budi daya udang daerah ini misalnya 1.362 hektar, sedangkan yang dimanfaatkan baru 15 hektar. Begitu juga kawasan wisata di Pulau Rupat yang memiliki bentangan pasir putih sepanjang 13 kilometer dan dapat ditempuh 30 menit dari Malaysia menggunakan *speed boat*. Sudah belasan investor mengintai peluang semacam ini.

Cuma saja, Bengkalis tidak boleh melupakan pendidikan karena selama ini bidang tersebut juga tertinggal. Memang ada upaya Pemerintah Kabupaten memperbaikinya, menempatkan dana hampir 30 persen dari APBD. Caranya, antara lain mendatangkan guru dari negeri jiran seperti Malaysia. Upaya membebaskan segala pungutan dalam pendidikan termasuk SPP dan BP3 pada semua jenjang pendidikan sudah dilaksanakan, sehingga tidak ada alasan penduduk tidak mengecap pendidikan hanya karena soal duit. Ratusan orang memperoleh beasiswa setiap tahun, termasuk menuntut ilmu ke luar negeri. (TI/SMN)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 20 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 9 / 1 - 8
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : BOM / 358.23

Bom Raksasa Penebar Ketakutan

LEDAKAN bom biasa saja lazimnya sudah menakutkan kebanyakan orang. Apalagi kalau yang meledak bom raksasa. Dengan berat 21.000 pon atau 9,5 ton, inilah bom nonnuklir yang paling dahsyat. Bahkan, kini AS sedang mempertimbangkan pembuatan versi 13,5 ton.

KARENA sosoknya yang besar dan berat itu, ia dinamai bom MOAB (Massive Ordnance Aerial Blast) alias bom udara berukuran besar.

Karena ukuran itu—lalu juga kedahsyatannya—bom MOAB ini juga dijuluki MOAB (Mother of All Bombs atau ibu segala bom).

Bom ini tanggal 11 Maret lalu diuji di sebuah pangkalan di Florida. Pemilihan uji coba yang dekat dengan pecahnya Perang Teluk II tampaknya disengaja. Itu karena kinerja bom yang potensial menimbulkan ketakutan luar biasa sehingga bisa digunakan sebagai alat intimidasi. Yang ingin ditakut-takuti siapa lagi kalau bukan tentara Irak.

Bila diteliti, sesungguhnya bom yang bobotnya setara dengan enam mobil VW kodok dan merupakan bom konvensional paling besar yang digunakan di kalangan militer ini adalah untuk penggunaan secara terbatas.

MOAB dijatuhkan dari pesawat angkut seperti Hercules C atau Globemaster C-17 yang terbang pelan. Dalam menuju sasaran, ia dituntun oleh satelit.

Bom dengan bantuan sekring meledak tak jauh di atas tanah dan meratakan apa saja yang ada dalam jangkauan kekuatannya.

Menurut Pentagon, pihaknya tidak akan menggunakan bom raksasa berbentuk rudal itu sembarangan karena khawatir akan menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Tetapi, di awal Perang Teluk 2003, bila akhirnya pecah, Pentagon tampaknya tergoda menggunakan bom ini di dekat tentara Irak.

"Selain melontarkan benda-benda ke atas, bom ini dirancang untuk mengagetkan dan menimbulkan rasa takut di kalangan tentara Irak," ujar Chris Bolkcom, analis militer di Dinas Riset Kongres, seperti dikutip *USA Today* (11/3).

Tetapi, sempat dipikirkan juga bahwa MOAB bakal dipergunakan untuk membalas bila Saddam Hussein menembakkan senjata kimia.

Pengeboman dalam Perang Teluk 1991 yang berlangsung selama 38 hari disebut telah menimbulkan ketakutan di kalangan tentara reguler Irak dan membuat puluhan ribu lainnya menyerah.

"Saat diledakkan [illegible] pertama kali di Pangkalan Angkatan Udara Eglin pukul satu siang, MOAB menimbulkan awan cendawan berwarna putih, bak kapas atau asap yang lazim keluar dari kebakaran," ujar Karen Roganov, Juru Bicara Eglin yang menonton pengujian dari jarak hampir 50 km.

Kalau MOAB saja sudah sedemikian menakutkan, apalagi bom lain yang juga segera dimunculkan, yakni bom BLU (Bomb Live Unit) Besar yang beratnya 30.000 pon (sekitar 13,5 ton).

Sementara BLU Besar belum ada, yang ada adalah MOAB, yang bukan nama kota kecil di negara bagian Utah. MOAB selain untuk menakut-nakuti, juga bisa diarahkan untuk menghancurkan istana.

Perbandingan

Menyaksikan hasil ledakannya, stasiun televisi *ABC News* memberitakan, bom ini "serupa senjata nuklir kecil". Majalah *Time* juga melaporkan, bom itu "memuat daya pukul yang dimiliki senjata nuklir kecil", kutip Fred Kaplan dalam artikelnya di situs Slate (13/3).

Akan tetapi, itu perbandingan yang berlebihan dan menyesatkan. Muatan peledak *high-explosive* MOAB hampir sembilan [illegible]

jata nuklir paling mungil di arsenal AS punya kekuatan ledak 1.000 ton (atau satu kiloton). Jadi, mestinya harus dikatakan bahwa daya ledak MOAB seperseratus daya ledak senjata nuklir kecil.

Bom konvensional besar ini secara teknologi juga sebenarnya tidak membawa kemajuan berarti. Selama Perang Dunia II, Angkatan Udara Inggris (RAF) membuat bom 10 ton yang disebut Grand Slam yang dijatuhkan pesawat pengebom Lancaster ke arah kandang-kandang U-boat Nazi.

Angkatan Udara Angkatan Darat AS juga membuat bom T-12 Cloudmaker yang berukuran sekitar 20 ton (44.000 pon), tetapi sampai perang berakhir bom ini tak digunakan.

Bandingkan pula dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima yang punya daya ledak 13.000 ton atau lebih dari 26.000.000 pon.

Walaupun demikian, untuk ukuran bom konvensional, MOAB memang sungguh besar. Bom ini melontarkan ledakan 10 kali lebih besar dibandingkan rata-rata "bom pintar" yang dipakai oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS. MOAB 20 persen lebih besar dibandingkan dengan bom BLU-82 "Daisy Cutter" yang berukuran enam ton (15.000 pon), yang sampai sebelum MOAB merupakan bom paling kuat di arsenal nonnuklir AS.

MOAB, menurut perwira Humas Pangkalan Eglin Jim Swinson, memang dimaksudkan sebagai "modernisasi" Daisy Cutter. Dengan ide itu, maka bom baru ini pun banyak diduga akan digunakan untuk melakukan misi serupa yang dikerjakan oleh pendahulunya.

Daisy Cutter tidak saja menimbulkan suara ledakan amat dahsyat, tetapi dengan meledak dua meter sebelum menyentuh tanah, ia akan meratakan hampir apa saja—manusia dan sebagian besar bangunan—dengan tanah dalam radius beberapa ratus meter.

Penggunaan

Di Vietnam, Daisy Cutter digunakan untuk membuat secara instan landasan mendarat helikopter di tengah hutan lebat. Sejumlah lainnya juga digu akan di Perang Teluk I. Menurut kajian resmi AU AS, bom-bom ini dijatuhkan dari pesawat bermeriam Hercules MC-130 "untuk membersihka medan ranjau dan mendukung operasi psikologis".

Apa yang dimaksud dengan istilah terakhir itu? Swinson menguraikan, "Kalau Anda menghadapi beberapa divisi dan Anda ingin memberi mereka kesempatan menyerah, ja tuhkan beberapa bom itu."

Selanjutnya akan diketahui seberapa efektif senjata tersebut. Komandan musuh bisa memilih lebih baik menyerah, atau kalaupun tidak, mereka karena takut—akhirnya memi lih sembunyi sehingga tidak la gi menjadi tentara yang efekti

Meski tidak da yang beran berspekulasi, bisa juga Daisy Cutter atau MOAB digunakar untuk menghancurkan bebera pa bagian istana kepresidenar Saddam Hussein, mungkin sebagai satu upaya simbolis. Ata dasar skenario ini pula MOAB juga dijuluki "penghancur istana" (*palace-buster*).

Dari segi operasional, MOAI lebih maju dibandingkan Daisy Cutter. Kalau yang terakhir ini masih menggunakan parasut, dan pilot harus terbang di atas sasaran dan terbang rendah, hal yang bahaya bila daerah tersebut dilindungi pertahanan udara kuat, MOAB digunakan seperti bom pintar. Setelah dilontarkan, ia dibimbing ke sasaran oleh satelit GPS atau giroskop inersial. Ini membuat pilot bisa menjatuhkannya jauh di atas jangkauan radar pertahanan udara.

Adanya sirip juga menambai keamanan pilot. MOAB yang sudah dikembangkan sejak tahun silam kini mungkin belum dibuat banyak. Tetapi, cerita tentang senjata baru ini saja jelas sampai di kalangan militer Irak yang jam-jam ini sibuk menduga senjata apa yang mungkin akan meledak di dekat mereka pada jam-jam pertama perang. (NIN)

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....



ASSOCIATED PRESS/DEPARTMENT OF DEFENS

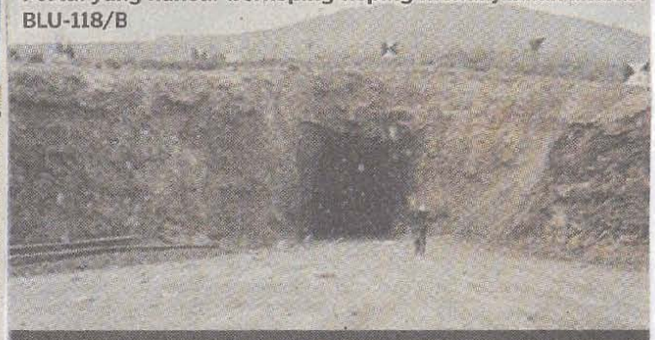
MOAB — *Inilah rangkaian uji coba MOAB yang diabadikan dalam video. Uji coba peledakan yang berlangsung Selasa, 11 Maret 2003, di Florida, Amerika Serikat, itu menghasilkan awan cendawan berwarna putih yang terlihat dari jarak hampir 50 kilometer.*

Dampak BLU-118/B dengan hulu ledak termobarik



Lokasi uji coba BLU-118/B di Nevada, AS. Tampak bunker yang dilindungi dengan portal sebagai target penembakan, sebelum uji coba.

PASCAPENEMBAKAN
Portal yang hancur berkeping-keping menunjukkan akurasi BLU-118/B





BLU-118/B dengan hulu ledak termobarik

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

Bom ...r dan Bom Penembus Bunker

KETIKA mempersiapkan Perang Teluk II, AS juga mempersiapkan sejumlah senjata selain bom MOAB yang disinggung dalam tulisan di atas, atau Bom-E yang disinggung dalam tulisan *Kompas* edisi Rabu (19/3).

Bila dalam Perang Afganistan kemarin tantangan pada pihak AS adalah mengebom goa-goa yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pendukung Al Qaeda, kini salah satu yang disasar adalah bunker bawah tanah yang diduga menjadi tempat persembunyian Presiden Saddam Hussein dan para petinggi militernya.

Bom yang punya kemampuan menembus bunker ini adalah jenis GBU-28 yang memang dijuluki bom "penghancur bunker". Ini adalah bom berpengarah laser seberat dua ton lebih (5.000 pon) yang bisa dijatuhkan dengan pesawat pengebom tempur F-15E.

Bom ini dirancang untuk menembus Bumi sampai sejauh 30 meter (100 kaki) dan beton diperkuat setebal enam meter (22 kaki).

Pada Perang Teluk 1991, dua bom yang baru selesai dibuat ini dijatuhkan oleh pesawat F-111. Berikutnya, perbaikan dilakukan sehingga membuatnya menjadi lebih akurat. Menurut berita *CNN*, pesawat pengebom B-2 Spirit yang berpangkalan di Whiteman, Missouri, juga bisa ditugaskan untuk menjatuhkan bom jenis ini.

Menurut berita pekan silam, memang B-2 telah dipersiapkan untuk misi ini. Jenis bom lainnya lagi yang diduga bisa digunakan adalah "bom pemadam listrik" (*blackout bomb*). Senjata nonkinetik ini kalau dilepas akan menyebarkan benang-benang serat karbon yang akan melumpuhkan jaringan listrik.

Ada lagi bom CBU-97 yang merupakan munisi pintar pertama yang dioperasikan Angkatan Udara. Bom ini menggunakan sensor laser aktif dan inframerah pasif untuk menemukan musuh.

Selain itu masih ada JDAM (Joint Direct Attack Munition). Senjata ini menggunakan sinyal GPS untuk mengubah bom bodoh menjadi bom presisi tinggi.

Sebagai negara pengembang teknologi maju dan memiliki angkatan perang kuat guna menopang status adidayanya, AS memang memiliki pelbagai jenis persenjataan untuk menangani sasaran yang berlainan. (NIN)

SENJATA-SENJATA PENEMBUS BUMI

Bom yang punya kemampuan menembus bunker mungkin saja digunakan Amerika dalam perang Irak untuk menghancurkan senjata pemusnah massal yang disembunyikan jauh di dalam tanah.

GBU-28/B

Senjata konvensional tapi sudah tergolong pintar digunakan pertama kali tahun 1991 dalam Perang Teluk dan kemudian di Afganistan.



Ketepatan tinggi. Senjata ini ideal untuk menyerang target yang tidak terlalu dalam. GBU-37 sebagai versi yang sudah diperbarui dapat menghancurkan tempat penyimpanan misil.

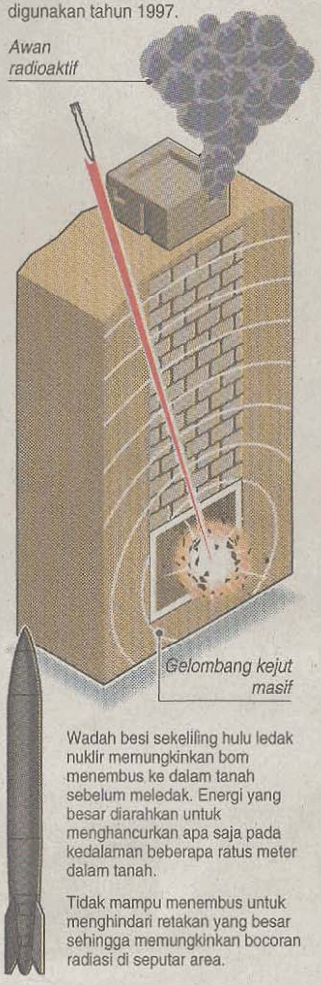
Target. Bangunan bawah tanah yang terlindungi granit atau dihubungkan dengan terowongan ke gunung tak tersentuh senjata ini karena penetrasinya masih terbatas.

Kemungkinan. Bisa digunakan untuk serangan beruntun. Pengeboman yang tidak hanya berlangsung sekali memungkinkan untuk peningkatan penetrasi.

Panjang	5,84 m
Diameter	370 mm
Berat	2.130 kg
Hulu ledak	300 kg high explosive
Penetrasi	6m beton

B61-11

Modifikasi bom nuklir B61 mulai digunakan tahun 1997.



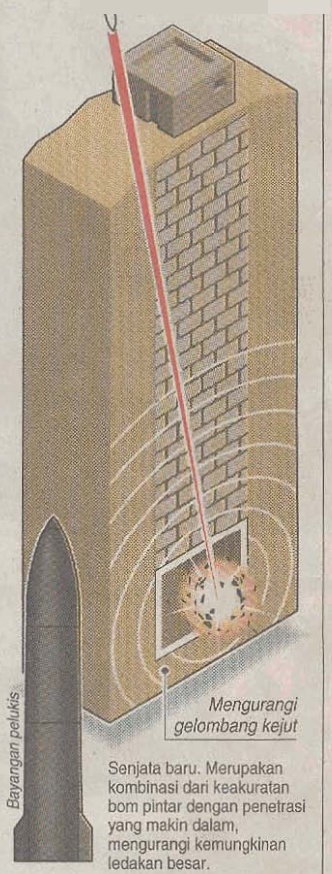
Wadah besi sekeliling hulu ledak nuklir memungkinkan bom menembus ke dalam tanah sebelum meledak. Energi yang besar diarahkan untuk menghancurkan apa saja pada kedalaman beberapa ratus meter dalam tanah.

Tidak mampu menembus untuk menghindari retakan yang besar sehingga memungkinkan bocoran radiasi di seputar area.

Panjang	3,68 m
Diameter	338 mm
Berat	548 kg
Hulu ledak	0,3kT-340kT nuklir
Penetrasi	15 m beton

RNEP

Desain baru untuk Robust Nuclear Earth Penetrator yang tampaknya menjadi modifikasi yang lebih maju dari bom nuklir B61 atau B83.



Senjata baru. Merupakan kombinasi dari keakuratan bom pintar dengan penetrasi yang makin dalam, mengurangi kemungkinan ledakan besar.

Senjata nuklir. Dengan muatan 0,1 kiloton (kT) dan nuklir mikro dengan muatan 0,01 kT dapat menghancurkan target hingga ratusan meter di dalam tanah dan mengurangi risiko kerusakan di atas tanah.

Sumber: Jane's Information Group, Federation of American Scientists

REUTERS

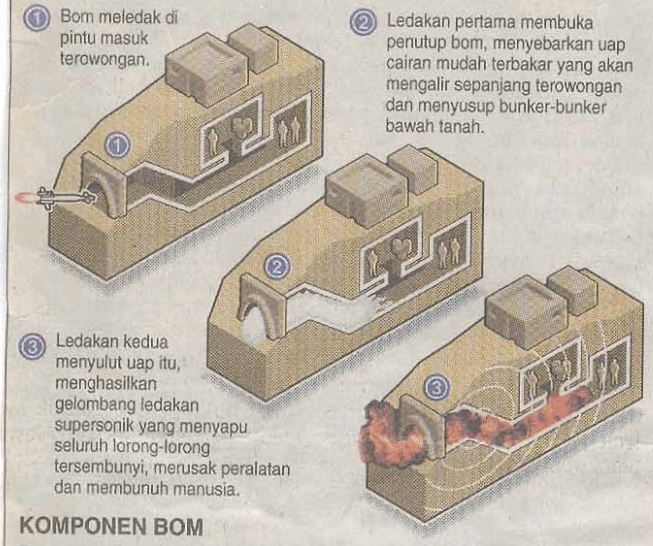
Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

BOM TERMOBARIK

Bom "pemburu bunker" termobarik yang sudah diuji coba di Afganistan, tampaknya bakal digunakan AS memerangi Irak.

CARA KERJA



KOMPONEN BOM

Bom termobarik BLU-118 dipasang pada bom dengan penjejak laser, seperti GBU-24. Bisa ditembakkan dari pesawat tempur AS.



Panjang	4,3 m
Berat total	900 kg
Berat kepala senjata	240 kg

Sumber: Jane's Information Group

REUTERS

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 23 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 1 S-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : RUDINI
Subjek : PRESIDEN PERTANGGUNGAN JAWAB | 351.003

Gus Dur dan Permasalahan Demokrasi

KELUARNYA memorandum kedua oleh DPR tanggal 30 April 2001 telah disambut positif oleh pelaku pasar. Hal itu terlihat dengan sempat menguatnya nilai *tukar rupiah terhadap dollar* AS. Setelah itu pasar juga menunggu reaksi Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap memorandum kedua tersebut. Aksi kekerasan yang tidak jadi dilakukan oleh pendukung Gus Dur maupun yang kontra, sungguh *menjadi momen penting dalam* memberikan pendidikan politik kepada rakyat untuk bersikap demokratis dan taat kepada konstitusi.

Memantau perkembangan politik baik sebelum maupun sesudah memorandum kedua potensi munculnya aksi ekstra parlemen untuk mendukung Presiden Abdurrahman Wahid dengan pasukan berani matinya masih mencemaskan kita akan masa depan demokrasi dan konstitusi. Hal itu terlihat dengan tingginya tingkat ancaman dari pendukung Abdurrahman Wahid dan kontra ancaman juga muncul dari kelompok yang anti terhadap Abdurrahman Wahid. Ancam mengancam tentu saja tidak demokratis. Karena itu masa depan demokrasi masih tetap mengkhawatirkan. Tetapi, Sidang Paripurna DPR yang berjalan aman dan lancar sekaligus juga memunculkan sikap optimis kita akan kesadaran rakyat untuk membela demokrasi dan konstitusi.

Salah satu ciri menonjol dari negara demokrasi, tidak ada penguasa yang mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara nonkonstitusi, betapa pun besarnya jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negaranya. Bill Clinton, Helmut Kohl, Francois Miterrand adalah tipe pemimpin demokrat yang berhasil. Clinton dalam dua periode kekuasaannya telah membawa kemakmuran yang luar biasa bagi rakyat AS.

Tetapi, karena konstitusi membatasi masa jabatan seorang presiden tidak boleh lebih dua kali berturut-turut, Clinton dengan suka rela tidak mencalonkan diri lagi untuk pemilihan masa berikutnya. Hal yang sama juga terjadi pada Helmut Kohl. Dialah arsitek terhadap runtuhnya tembok Berlin, tahun 1990, yang membuat Jerman kembali bersatu. Ketika rakyat Jerman tidak memerlukannya lagi, Kohl tidak *ngotot mempertahankan* kekuasaannya. Hal yang sama juga kita lihat pada Miterrand dan pemimpin negara demokrasi lainnya.

Sikap arif

Kalaupun ada pemimpin negara yang menyebut dirinya demokrat lalu mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara maka dia adalah Slobodan Milosevic dari Yugoslavia, Laurent Kabila dari Kongo. Tetapi, Milosevic akhirnya dipaksa turun oleh rakyatnya secara tidak terhormat. Adapun Kabila lebih tragis lagi, dia mati ditembak oleh pasukan pengawalnya sendiri. Bangsa Indonesia tentu tidak ingin melihat pemimpinnya diseret secara tidak terhormat. Lebih daripada itu rakyat menginginkan keutuhan nasional terpelihara dan ekonomi lebih menjanjikan. Karena itu ketika tuntutan mundur yang sudah demikian gencar dan dikukuhkan dengan dikeluarkannya memorandum kedua sebaiknya Gus Dur bersikap arif sebagai seorang kiai dan negarawan.

Reformasi menuju demokratisasi di segala bidang telah menjadi tekad kita untuk mengisi dan menjaganya dari setiap rongrongan. Kalau kita lihat ke belakang, terpilihnya Gus Dur adalah pemilihan yang sangat demokratis oleh wakil rakyat yang dihasilkan oleh pemilu yang sangat demokratis. Karena itu sangat aneh bila kemudian pendapat dan suara DPR tidak dianggap sebagai suara rakyat. Kalau DPR tidak mewakili rakyat, tentu presiden terpilih juga bukan pilihan rakyat.

Sikap seorang demokrat sejati tentu akan memberi kesempatan kepada wakil rakyat untuk memutuskan sesuai dengan mekanisme demokrasi yang disepakati tanpa perlu mengarahkan massa untuk menekan legislatif. Gus Dur dicalonkan dan dipilih oleh MPR. Kalau kemudian MPR menarik dukungannya karena melihat ketidakmampuan presiden dalam menjalankan tugasnya, menurut logika demokrasi sangat dibenarkan. Memilih dan menurunkan seorang presiden di negara demokrasi adalah lumrah selama disokong oleh suara mayoritas anggota MPR.

Kalau logika demokrasi seperti ini dapat dipahami dengan baik maka pendukung Gus Dur tidak perlu merasa terhina kalau Presiden Abdurrahman Wahid diganti oleh MPR, karena Gus Dur bukan Presiden NU. Memorandum yang disampaikan DPR kepada Presiden dari sudut hukum formal masih pada tingkat peringatan. Memberi peringatan dan pengawasan merupakan tugas utama DPR. Untuk tugasnya itu wakil rakyat tersebut tidak dapat dituduh telah melakukan kudeta konstitusional.

Memang harus diakui juga salah satu jasa Gus Dur dalam penumbuhan demokrasi adalah dengan memberikan kesempatan kepada DPR untuk mandiri. Saat ini DPR dapat setiap saat memanggil Presiden untuk dimintai pendapat dan keterangan mengenai suatu permasalahan politik kenegaraan. Kondisi yang kondusif ini jelas tidak pernah ada dalam zaman Orde Baru. Pada waktu lalu DPR lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Perubahan tersebut telah menimbulkan kekagetan dan bahkan ketakutan bagi sebagian anggota masyarakat.

Kita akui memang, untuk menumbuhkembangkan demokrasi itu tidaklah mudah. Waktu dua tahun jelas belum cukup untuk menyosialisasikan demokrasi termasuk kepada elite politik. Selama ini demokrasi masih sebatas wacana yang enak diseminarkan dan dibicarakan. Tetapi, ketika menghadapi demokrasi dalam realitas banyak yang grogi dan belum siap.

Saat ini masyarakat kita masih gamang melihat demokrasi. Tetapi, di sini pula tantangan untuk memelihara demokrasi agar dapat terus berkembang sehingga lebih memberikan rasa keadilan bagi segenap tumpah darah Indonesia. Karenanya salah satu kunci pengembangan demokrasi terletak pada sikap arif Gus Dur membaca situasi yang sedang berkembang.

◆ **Rudini**, *Ketua Umum Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI).*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 26 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 18 / 5-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : SWATANTRA / 352

Segera Amandemen UU tentang Otonomi

Sementara menghadapi pergulatan politik di tingkat elite yang semakin mengacaukan kondisi masyarakat, para bupati dan wali kota harus segera mengadakan konsolidasi dengan gubernur untuk menghindari munculnya semangat separatisme yang semakin tinggi.

"Undang-undang Otonomi Daerah harus segera diamandemen. Di negara mana pun di dunia ini tidak ada otonomi dilekatkan pada distrik atau kabupaten," ujar Azyumardi Azra usai seminar sehari tentang "*Making Democracy Work*" yang diselenggarakan oleh American-Indonesian Exchange Foundation (Aminef), Jumat (25/5), di Nusa Dua, Bali.

Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, kalau kondisi seperti sekarang ini dibiarkan terus akan sangat berbahaya karena bisa terjadi perpecahan menjadi daerah-daerah kecil. Kondisi sekarang ini sudah mengkhawatirkan sekali. "Keputusan Menteri tentang fungsi Gubernur sebagai koordinator persoalan-persoalan lintas batas, juga tidak jalan," lanjut Azyumardi yang sering diundang pada pertemuan wali kota dan bupati se-Indonesia ini.

Menurut survei dan pengamatan, daerah-daerah kabupaten itu lemah sumber daya manusia dan ekonominya. Karena itu seharusnya kabupaten kabupaten yang kaya membantu kabupaten lain. Tetapi soal ini pun tidak terpecahkan. Apalagi persoalan-persoalan praktis seperti pembagian air tanah yang mengalir melintasi dua kabupaten," katanya.

Lebih dari itu, mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain juga akan mengalami hambatan terutama dari segi birokrasi. Situasi otonomi sekarang ini juga sudah memunculkan penerapan-penerapan pemungutan pajak, yang menurut Asyumardi, semakin bersifat eksploitatif.

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang belum jelas ini, katanya, menambah ruwetnya persoalan politik khususnya pada tingkat lokal. "Persoalan yang muncul bukan hanya konflik politik lokal namun juga potensi konflik etnis yang tampak semakin menguat," katanya.

Dia memandang kerangka hukum dan peraturan perundangan otonomi daerah ini belum jelas. Hal itu menimbulkan kebingungan-kebingungan. **(isw)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 30 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 1 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PRESIDEN - PERTANGGUNGJAWABAN [351.003
~~340~~. Klass

SI MPR Tak Bisa Dibendung

Jakarta, Kompas

Laju Sidang Istimewa (SI) MPR tak bisa dibendung. Tujuh fraksi DPR, Selasa (29/5) malam, menyatakan konfirmasinya bahwa mereka akan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengadakan sidang istimewa dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini di Jakarta.

Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), Fraksi Reformasi, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI), dan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU).

Fraksi TNI/Polri diperkirakan akan memilih sikap abstain, sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) menyatakan menolak sidang istimewa. Bahkan, F-KB melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan Dewan meminta agar pelaksanaan Rapat Paripurna DPR hari ini ditunda untuk memberi kesempatan kepada seluruh anggota Dewan mempelajari keputusan Jaksa Agung yang menyatakan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlibat kasus penyelewengan dana Yanatera Bulog dan sumbangan dana Sultan Brunei. Surat itu ditandatangani Ketua F-KB Taufikurrahman Saleh dan Sekretaris Abdul Khalik Ahmad.

Presiden Abdurrahman Wahid, kemarin, bertemu dengan Menteri Pertahanan Moh Mahfud di Lagoon Tower Lantai 12 Hotel Hilton, Jakarta. Usai pertemuan, kepada pers, Mahfud mengatakan, tidak ada jaminan tidak akan ada Dekrit Presiden karena dekrit itu merupakan hukum ekstrakonstitusional.

Mahfud menekankan bahwa baik Sidang Istimewa MPR maupun Dekrit Presiden sama-sama mempunyai risiko sosial dan politik. "Tentang risiko dekrit, kami (Tim Tujuh—**Red**) sudah menyampaikan kepada Presiden sehingga Presiden tidak jadi mengeluarkan dekrit hari Senin. Sekarang kami sampaikan ke DPR, ada risiko kalau SI MPR," katanya.

Kemarin siang, Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono bersama Panglima TNI Laksamana Widodo AS, Kepala Polri Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro, Kasum TNI Letjen Djamari Chaniago, Kaster TNI Letjen Agus Widjojo, bertemu dengan Ketua DPR Akbar Tandjung dan kemudian dengan Ketua MPR Amien Rais.

Yudhoyono menyampaikan surat yang berisi respons atau jawaban Presiden Abdurrahman Wahid terhadap memorandum kedua DPR kepada Akbar Tandjung.

Dalam jumpa pers bersama antara Ketua MPR Amien Rais dengan rombongan Menko Polsoskam, Amien mengisyaratkan bahwa DPR akan meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. "Besok (hari ini—**Red**) Rapat Paripurna DPR kemungkinan akan meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa. Kita harus antisipasi jangan sampai ada pihak-pihak yang dipermalukan dengan adanya sidang istimewa ini," kata Amien.

Berkaitan dengan itu, Yudhoyono berharap agar keputusan politik di DPR itu dapat berjalan dengan baik, tertib, damai, dengan tingkat kematangan tinggi para politisi sehingga tidak menimbulkan suasana psikologis yang tidak baik pada masyarakat.

Kepastian PDI-P

Kepastian sikap PDI Perjuangan dihasilkan dalam rapat F-PDIP DPR yang berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Jalan Pecenongan, Jakarta, Selasa pagi, dan dipimpin Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Menurut Sekjen PDI-P Sutjipto, pada prinsipnya PDI-P menghendaki proses konstitusional dari memorandum pertama dan memorandum kedua berlanjut ke SI MPR. PDI-P melalui fraksinya meminta MPR mengadakan sidang istimewa.

Malam harinya, di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, mulai pukul 19.00 sampai pukul 22.20, Tim Delapan Fraksi PDI-P merampungkan delapan halaman tanggapan fraksi, yang akan dibacakan oleh Sophan Sophiaan. Menurut Sutjipto, secara substansi apa yang dibahas oleh Tim Delapan sama dengan keputusan rapat pagi harinya.

Tentang masih adanya anggota fraksi yang berbeda pendapat soal SI MPR dalam rapat pagi hari, menurut Sutjipto, wajar bila dalam rapat-rapat untuk menyusun suatu keputusan fraksi berbagai pendapat berkembang. Dalam diskusi-diskusi mengenai memorandum kedua, memang ada anggota fraksi yang semula berpendapat bahwa mungkin lebih baik kalau tidak ada sidang istimewa.

"Akan tetapi, setelah menjadi keputusan akhir, seluruh anggota fraksi satu suara bahwa meminta DPR nanti untuk meminta MPR mengadakan atau melaksanakan sidang istimewa. Hanya itu suara keluarnya," tegasnya.

Menjawab pertanyaan apakah SI MPR akan menjadi *impeachment* bagi Presiden Abdurrahman Wahid, Sutjipto menegaskan, "Niat PDI-P tidak kesana. Yang jelas, sesuai dengan ketentuan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, kalau kita sudah melewati memorandum pertama dan memorandum kedua dan SI MPR, maka agenda utamanya adalah meminta pertanggungjawaban Presiden."

Berkaitan dengan kemungkinan diadakannya kompromi, Sutjipto mengatakan, "Kalau PDI-P, utamanya Ketua Umum, prinsipnya dalam proses pengambilan keputusan secara politis dalam kehidupan ketatanegaraan adalah konstitusi. Jadi, kalau kemarin Megawati menolak tawaran untuk pelimpahan tugas dari Presiden, bukan berarti apa-apa, tetapi yang dipertanyakan adalah yang pertama lingkupnya sejauh mana, yang kedua prosesnya atau prosedur konstitusionalnya lewat jalur yang mana. Diyakini paling terang jalannya adalah lewat jalur sidang istimewa. Bahwasanya di sana nanti ada keputusan-keputusan pelimpahan tugas dan lain-lain, semua itu diputuskan lewat sidang MPR," ujarnya.

Ditanya apakah Megawati dan Abdurrahman Wahid tidak bisa disatukan lagi, Sutjipto mengatakan, "Kalau bahasanya antara Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), setahu saya tidak ada masalah yang serius. Kalau sikap politiknya ada perbedaan, itu dari dulu sudah terbiasa begitu."

Konflik kepentingan

Ketua Fraksi TNI/Polri DPR Letjen Budi Harsono, yang dihubungi Selasa malam, menuturkan, sepanjang malam tadi,

Fraksi TNI/Polri masih memperhatikan perkembangan politik dan kegiatan massa. Tentang adanya komentar dari anggota Fraksi TNI/Polri yang mendukung Sidang Istimewa MPR, Budi menegaskan, itu hanya pendapat pribadi, bukan pendapat fraksi. "Kami masih terus dalam finalisasi tanggapan fraksi malam ini," tuturnya.

Budi mengamati tujuan semula dari memorandum kedua telah melebar menjadi konflik kepentingan kekuasaan. Konflik elite itu juga merembes ke tingkat lapis bawah, terutama oleh pihak yang bertahan. "Ketegangan Presiden dan DPR juga tidak mereda. Kebuntuan politik masih terjadi. Itu yang kami hadapi," katanya.

Ada dua sisi pengamatan Fraksi TNI/Polri, yaitu tetap bersikap kritis terhadap aspirasi masyarakat. "Tetapi kami tidak terlibat dalam politik praktis dan konflik kepentingan," katanya.

Anggota DPR dari F-KB, Ali As'ad, mengatakan, memorandum pertama dan kedua DPR telah kehilangan relevansi setelah Jaksa Agung menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid. "Karena itu, kami mengimbau seluruh fraksi DPR dan kekuatan politik lain untuk bersikap arif dan tepat sesuai semangat supremasi hukum," ujar Ali kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa.

Ali menambahkan, memorandum pertama dan kedua telah mendatangkan keresahan di kalangan masyarakat. "Proses kelahiran memorandum dan SI MPR juga telah melahirkan pro dan kontra yang tajam di kalangan masyarakat sehingga mengancam timbulnya konflik horizontal," katanya.

Dicari solusi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, sikap Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPR Rabu hari ini jelas, yakni DPR juga meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa. Meski demikian, dalam sidang istimewa pertanggungjawaban Presiden tidak harus diminta, tetapi dicari solusi atas kebekuan politik yang terjadi.

Menurut Tandjung, yang ditanya pers usai rapat terakhir DPP Partai Golkar, Selasa tengah malam, memorandum kedua merupakan aturan yang konstitusional. Dengan demikian, kalaupun SI MPR dilaksanakan, hal itu masih dalam kerangka proses konstitusional tersebut. Alasan Partai Golkar agar DPR meminta MPR melaksanakan SI MPR karena Presiden Abdurrahman Wahid tidak sungguh-sungguh mengindahkan memorandum kedua.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional, melalui pertemuannya yang berakhir Selasa tengah malam di Kantor DPP PAN di Tebet, juga mengemukakan bahwa partainya akan meminta sic istimewa.

Sedangkan Ketua F-PPP Ali Marwan Hanan memastikan bahwa partainya tidak akan berbasa-basi lagi untuk langsung meminta SI MPR. Alasannya, sikap awal sejak memorandum pertama pun PPP sudah meminta SI MPR. SI MPR, menurut Ali, untuk meminta klarifikasi Presiden dan tidak harus berakhir pada *impeachment* atau meminta Presiden mundur.

Mudahan Hazdi, sekretaris F-PDU, juga memastikan partainya akan meminta SI MPR. Alasan mengapa F-PDU meminta SI MPR, karena Presiden cenderung melakukan perlawanan dan bukan malah memperbaiki kinerjanya.

Bukan asal dijatuhkan

F-KKI DPR tidak menolak apabila Dewan memutuskan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Dikatakan Wakil Ketua F-KKI Tjetje Hidayat Padmadinata, persetujuan gelarnya SI MPR itu bukan untuk menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid, melainkan sebagai jalan untuk penyelesaian politik secara kenegarawanan.

F-PBB dan Fraksi Reformasi pun setuju meminta MPR untuk menggelar SI MPR. Menurut Sekretaris F-PBB Hamdan Zoelva, setelah diberikan memorandum kedua pun Presiden tak tampak melakukan perbaikan. Bahkan, Presiden terkesan "main-main", antara lain dengan mengeluarkan maklumat yang secara substansial tak ada maknanya.

Mutammimul 'Ula dari Fraksi Reformasi menegaskan, SI MPR adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan politik saat ini. "Tidak ada jalan lain, persoalan politik ini harus diselesaikan melalui SI. Fraksi Reformasi tetap akan meminta MPR menggelar SI," katanya.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) tak akan meminta MPR menggelar SI untuk menyelesaikan persoalan politik saat ini. Sekretaris F-PDKB Gregorius Seto Harianto menegaskan, fraksinya Rabu ini dalam Sidang Paripurna DPR kembali akan mengingatkan fraksi lain menata sistem moral bangsa ini.

Risiko yang dibayar

Yudhoyono mengibaratkan proses politik yang terjadi di DPR sebagai sebuah aliran. Jika proses politik yang terjadi di DPR sebagai hulu, katanya, maka hilirnya adalah masyarakat luas. "Kita ingin alirannya aliran yang baik. Dengan demikian *cost* dan risiko yang harus kita bayar berada pada tingkat yang *reasonable*," katanya.

Yudhoyono mengungkapkan, analisis intelijen yang telah dan sedang dilakukan meniscayakan untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi. Pelaksanaan Rapat Paripurna DPR yang diduga membuahkan keputusan politik pada tingkat lembaga legislatif, katanya, langsung atau tidak langsung akan berimplikasi pada masyarakat terutama pada masyarakat, yang ingin pilihan keputusan lain. **(tra/bur/pep/ mba/gun/**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 31 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 1 / 3-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / No. Klass : PRESIDEN - PERTANGGUNG JAWAB | 321.003

Sidang Istimewa MPR Minta Pertanggungjawaban Presiden

Jakarta, Kompas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan sidang istimewa (SI) dengan agenda meminta pertanggungjawaban Presiden. Permintaan SI MPR dalam Rapat Paripurna ke-62 DPR masa persidangan keempat, Rabu (30/5), merupakan kelanjutan proses memorandum pertama dan kedua DPR kepada Presiden Abdurrahman Wahid. DPR meminta MPR melaksanakan SI MPR karena DPR menganggap Presiden tidak mengindahkan memorandum kedua.

Karena tidak mengindahkan memorandum kedua, sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat 4 Ketetapan (Tap) Nomor III/MPR/1978, SI MPR dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Sedangkan untuk melaksanakan SI MPR, sesuai Pasal 33 Ayat 3 Peraturan Tata Tertib MPR, Badan Pekerja (BP) MPR selama dua bulan ke depan mempersiapkan agenda dan materi persidangan. Dengan demikian, SI MPR itu baru dapat terlaksana pada Agustus 2001.

Menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR, Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers, semalam, mengatakan, semua pihak wajib menghormati proses politik atau proses demokrasi di DPR yang akhirnya sampai pada keputusannya untuk merekomendasi digelarnya Sidang Istimewa MPR. Meski Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) telah melakukan *walk out* dalam Sidang Paripurna DPR semalam, lanjutnya, langkah itu juga harus dihormati.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan dikeluarkannya dekrit, Yudhoyono menyatakan, keputusan untuk mengeluarkan dekrit dalam situasi seperti saat ini adalah tidak tepat sehingga ia berharap keputusan tersebut tidak akan diambil. Pada kesempatan itu pihaknya juga menyatakan sangat lega atas kesediaan massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid yang mau menjaga ketertiban umum dalam melakukan aksi demonya.

"Kita wajib memberi kesempatan dan hak politik yang penuh kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk merespons keputusan DPR itu dan memberikan jawabannya saat Sidang Istimewa MPR mendatang. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Presiden karena senyatanya beliau adalah Presiden kita," ungkap Yudhoyono.

Jalannya Rapat Paripurna DPR diwarnai oleh aksi di luar gedung parlemen, di mana ribuan pendukung Abdurrahman Wahid melakukan unjuk rasa sepanjang hari. Sampai tengah malam, massa masih bertahan di depan Istana Merdeka dan melakukan orasi-orasi.

Sekitar pukul 23.30, sembilan orang yang mewakili Koalisi Anti Orde Baru (Lindas Orba) bertemu dengan Presiden. Mereka menuntut agar Presiden memberlakukan keadaan darurat sipil, membekukan DPR, dan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang dipercepat. Kesembilan orang itu adalah Thamrin Tomagola, Dita Indah Sari, Helmi Faisal, KH Asep Saefuddin, Sulaiman Haikal, H Fatur Rasyid, Martin Manurung, KH Mujib Imron, dan Alexander Irwan.

Usai bertemu Presiden, Tomagola kepada massa mengatakan, Presiden telah menerima dengan sepenuh hati pernyataan sikap yang disampaikan Lindas Orba. Menurut Tomagola, Presiden mengatakan dalam pekan ini akan ada tindakan tegas. Namun, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan tegas tersebut. Pernyataan Tomagola langsung disambut sorak-sorai massa dan mereka kemudian bersujud mencium tanah.

Tak akan mundur

Menanggapi hasil Rapat paripurna DPR tersebut, Juru Bicara Kepresidenan Yahya Staquf, pukul 16.00, mengatakan, sampai saat ini tidak ada rencana dari Abdurrahman Wahid untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden meski DPR sudah mengusulkan untuk dilangsungkan SI MPR. Sedangkan mengenai kemungkinan Kepala Negara mengeluarkan dekrit, Yahya mengatakan bahwa kebijakan itu tidak dibicarakan.

Menurut Yahya, karena Jaksa Agung sudah menyatakan Presiden tidak terlibat dalam dugaan penyelewengan dana Yanatera Bulog dan sumbangan dari Sultan Brunei Darussalam, maka secara hukum tidak ada alasan untuk menggugat atau meminta pertanggungjawaban Presiden berkaitan dengan dua hal itu.

Pemaksaan kehendak oleh sejumlah pihak untuk terus mempersoalkan keterlibatan Presiden dalam kedua kasus itu, lanjut Yahya, sejak dari memorandum pertama sampai sidang istimewa, merupakan tindakan yang mengabaikan dan mengecilkan arti hukum.

Hanya, yang ingin ditegaskan Presiden, sambung Yahya, agar seluruh rakyat Indonesia betul-betul memiliki pemahaman yang lurus mengenai garis-garis konstitusi yang dipegang bersama sebagai landasan keberadaan negara. "Jika konstitusi telah diabaikan, maka berarti juga mengabaikan lembaga kenegaraan," tutur Yahya Staquf.

Menegangkan

Rapat paripurna lanjutan yang dimulai pukul 19.45 setelah diskors berlangsung menegangkan akibat adanya protes dari F-KB yang menggugat keberadaan tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), yakni Kwik Kian Gie, Laksamana Sukardi, dan Benny Pasaribu. Keberadaan ketiga anggota Dewan itu dipersoalkan F-KB karena dianggap tidak sesuai dengan UU No 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD. F-KB mempersoalkan, ketiganya pernah menjadi pejabat eksekutif, tetapi kembali lagi ke DPR, sehingga apa pun keputusan rapat dianggap tidak sah.

Akan tetapi, Soetardjo melanjutkan sidang dengan agenda voting. Karena tidak setuju, F-KB memilih WO atau *walk out*. Hasil voting yang tanpa diikuti F-KB itu menunjukkan 365 anggota Dewan setuju DPR meminta MPR menyelenggarakan SI MPR dengan agenda meminta pertanggungjawaban Presiden, 4 tidak setuju, dan 39 abstain. Anggota Dewan yang abstain adalah dari 38 anggota F-TNI/ Polri dan seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), Astrid Susanto. Rapat ditutup pukul 21.30.

Adu argumen

Rapat paripurna yang dimu-

lai pukul 09.00 dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Selain Soetardjo, hadir lengkap pimpinan DPR, yakni Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya, AM Fatwa, dan Muhaimin Iskandar. Pada tiga jam pertama saat rapat dibuka, digunakan untuk beradu argumen lewat puluhan interupsi.

Rapat paripurna yang dihadiri 477 dari 500 anggota DPR baru bisa dimulai setelah dua kali skors. Dalam dua kali skors tersebut, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mengadakan lobi tertutup. Karena ada dua pendapat, Soetardjo mengambil keputusan voting untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan atau tidak. Setelah divoting, anggota Dewan yang setuju sidang dilanjutkan 426, tidak setuju 46, dan lima abstain.

F-PDIP yang mendapat giliran pertama lewat juru bicara Sophan Sophiaan menguraikan Pasal 7 Tap No III/MPR/1978 mengenai proses permintaan SI MPR lewat memorandum. F-PDIP menganggap, memorandum pertama selama tiga bulan dan memorandum kedua selama satu bulan, sudah cukup bagi Presiden untuk melaksanakan perbaikan. Namun F-PDIP menganggap Presiden tidak mengindahkan memorandum, bahkan terkesan melakukan tindakan dan langkah yang justru bertolak belakang dengan maksud DPR memberikan memorandum kedua tersebut.

Pernyataan-pernyataan Presiden seperti "akan terjadi pemberontakan nasional" apabila memorandum kedua diterbitkan, pernyataan "akan ada lima daerah yang menyatakan memerdekakan diri", serta pernyataan "apabila dirinya mundur bangsa Indonesia akan terpecah", merupakan pertimbangan yang "memberatkan" fraksi-fraksi, F-PDIP, Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), sehingga permintaan SI MPR tidak bisa dibendung lagi.

Permintaan agar DPR meminta MPR melaksanakan SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 4 Tap No III/MPR/1978, juga disampaikan F-PG lewat juru bicara Evita Asmalda, F-PPP lewat juru bicara Syahrudji Tandjung, dan Fraksi Reformasi lewat juru bicara Sutan Ambia B Boestam.

Fraksi TNI/Polri lewat juru bicara PL Tobing tidak menyebutkan secara tegas permintaan SI MPR, tetapi menyatakan akan menghormati semua keputusan yang diambil dalam rapat paripurna. Fraksi TNI/Polri berharap semua konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua pihak melalui proses dan mekanisme secara institusional dan konstitusional dengan dilandasi semangat rela berkorban demi terwujudnya pemerintahan yang efektif.

F-KB yang menyampaikan pendapat akhir terpanjang dengan juru bicara KH Ma'ruf Amin berpendapat bahwa memorandum kedua harus dipandang dan diperlakukan sebagai akhir dari persengketaan antarlembaga tinggi negara. Keputusan ini, katanya, bukan berarti menghentikan pengawasan DPR terhadap Presiden dan bukan pula berarti Presiden mengabaikan terhadap masukan dan pengawasan dari DPR.

"Apabila keputusan ini menjadi keputusan DPR, maka DPR berarti telah mendengarkan denyut nadi dan hati nurani rakyat banyak, yaitu kerinduannya pada kedamaian setelah batin dan fisiknya lelah karena ulah para pemimpinnya," katanya. F-KB tidak menyebut soal perlu-tidaknya pelaksanaan SI MPR.

F-PDKB dengan juru bicara Manasse Malo menyatakan, SI MPR tidak diperlukan. Menghapus ketidakadilan tidak boleh dilakukan dengan cara yang tak adil karena akan melahirkan ketidakadilan baru. Malo menekankan perlunya dialog antara seluruh komponen bangsa secara bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai masalah, khususnya soal ketegangan antara DPR dan lembaga kepresidenan. F-PDKB meminta Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pun menerima pelimpahan tugas konstitusional yang ditawarkan Presiden.

Meminta SI MPR

F-PBB, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI), dan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) dengan alasan yang berbeda, meminta MPR menggelar SI. "Dalam waktu satu bulan sejak dikeluarkannya memoradum kedua, tak ada tanda-tanda Presiden mengindahkan isi memorandum. Bahkan, pada waktu sebulan ini telah terdapat berbagai ucapan, rencana, dan langkah Presiden yang dapat dianggap sebagai contoh baru dari pelanggaran haluan negara," kata juru bicara F-PBB MS Kaban.

SI MPR, kata juru bicara F-PDU Sayuti Rahawarin, untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. "Tidak akan terjadi titik temu penyelesaian konflik dan krisis multidimensional dengan cara-cara yang inkonstitusional. Satu-satunya penyelesaian politik adalah melalui lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Dengan demikian, F-PDU mengusulkan kepada MPR untuk menyelenggarakan SI," kata Rahawarin.

Juru bicara F-KKI Sutradara Gintings menegaskan, SI MPR bukan berarti kiamat. Dalam SI MPR, secara teoretis belum tentu Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan. Jikalau pertanggungjawaban Presiden diterima MPR, maka dia akan menduduki jabatan sampai tahun 2004. Dalam SI MPR, Presiden diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk "membela diri" dalam pidato pertanggungjawabannya.

"Sebenarnya solusi politik kepentingan tidak akan menyelesaikan masalah kita sekarang ini. Cuma solusi kenegarawanan yang akan mampu memecahkan masalah besar dan rumit yang kita hadapi. Karena itu, dengan sungguh berat hati sekaligus rendah hati, F-KKI bisa memahami dan menyetujui bila DPR melakukan tindak lanjut memorandum kedua sesuai Ketetapan (Tap) Nomor III/MPR/1978, yakni DPR meminta MPR untuk mengadakan SI," jelas Gintings.

Sekalipun demikian, menurut Gintings, seluruh anggota MPR harus bertanggung jawab atas terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada Sidang Umum MPR 1999. MPR turut bertanggung jawab serta bersalah dalam segala permasalahan keterpilihan Abdurrahman Wahid karena sedari awal MPR sudah mengetahui keterbatasannya. "Sejak awal, kita sudah tahu problematik beliau terpilih. Karena itu, cuci tangan bukanlah bagian yang elegan dalam persoalan ini," katanya.

(pep/tra/gun/osd/ryi/osa)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 31 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : ARIANTO, Satya
Subjek / NO KLASS : PRESIDEN - PIDATO DAN AMANAT / 351.003 5

Maklumat

TANGGAL 28 Mei 2001, Presiden Abdurrahman Wahid tiba-tiba mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia (RI). Ditinjau dari segi materi muatannya, penerbitan Maklumat tersebut dilatarbelakangi oleh situasi darurat politik. Menurut penilaian Presiden, situasi ini kita hadapi karena adanya kontroversi mengenai kemungkinan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR dan kemungkinan pemberlakuan Dekrit Presiden.

Dengan Maklumat tersebut, Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Polsoskam) untuk mengambil tindakan dan langkah khusus yang diperlukan, dengan mengkoordinasikan seluruh aparat keamanan secara fungsional, guna mengatasi krisis serta menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya. (*Kompas*, 29/5/2001)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "maklumat" diartikan sebagai "pemberitahuan" atau "pengumuman". Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan RI semenjak tahun 1945, kata "maklumat" telah dipergunakan dalam berbagai konteks permasalahan, dan diterbitkan oleh berbagai institusi kenegaraan.

Dalam buku *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan [illegible] Republik Indonesia* yang dihimpun oleh Koesnodiprodjo dan diterbitkan pada sekitar tahun 1951-1952, misalnya, dapat ditemui tidak kurang dari 69 Maklumat yang di antaranya diterbitkan pada tahun 1945, 1948, dan 1949.

Jika dirinci, pada tahun 1945 antara lain telah dikeluarkan 27 Maklumat Pemerintah terdiri satu Maklumat Wakil Presiden, dua Maklumat Kepala Polisi Jakarta Raya, satu Maklumat Jaksa Agung, satu Maklumat Menteri Keuangan, satu Maklumat Kepala Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat, delapan Maklumat Menteri Kemakmuran, enam Maklumat Menteri Kesehatan, satu Maklumat SPKG Mangkunegoro VIII, dua Maklumat Mangkunegaran, tiga Maklumat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Maklumat Gubernur Maluku, dan satu Maklumat Jawatan Gas dan Listrik

Selanjutnya, pada tahun 1948 telah dikeluarkan tujuh Maklumat Presiden dan satu Maklumat Pemerintah. Terakhir, pada tahun 1949 telah dikeluarkan satu Maklumat (Bersama) Presiden RI dan Komite Nasional dan empat Maklumat Menteri Koordinator Keamanan. Di luar rekapitulasi jumlah maklumat tersebut, masih banyak maklumat-maklumat lainnya yang pernah dikeluarkan oleh berbagai pihak di Indonesia.

Jika kita teliti bentuk-bentuk peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan pada masa-masa awal terbentuknya Negara RI, akan tampak adanya beberapa peraturan yang sekarang tidak kita kenal lagi. Bentuk-bentuk peraturan yang dimaksud cukup banyak, misalnya, berbagai peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1945, yang antara lain meliputi sebagai berikut: Penetapan Pemerintah, Piagam Penetapan, Putusan Presiden, Pengumuman Pemerintah, Keterangan Pemerintah, Surat Edaran Pemerintah, Surat Dewan Kementerian, Ketetapan Dewan Menteri, Pengumuman, Pengumuman Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Keterangan Badan Pekerja KNIP, Instruksi KNIP, Pengumuman Badan Pekerja KNIP, Pengumuman Menteri, Perintah Menteri, Kawat Jaksa Agung, Instruksi Jaksa Agung, Instruksi Menteri, Anjuran Menteri, Peraturan Menteri, Keterangan Menteri, Hal Pembentukan Menteri, Surat Edaran Menteri, Amanat Kanjeng Sultan, Amanat Paku Alam, Amanat Kepala Daerah, Pendirian Para Pemimpin, Suara Kaum Buruh, Suara Pegawai, Suara Polisi, dan sebagainya.

Jika kita tinjau bentuk-bentuk peraturan tersebut, akan tampaklah bahwa problema mendasar dalam bidang perundang-undangan pada saat itu tidak jauh berbeda dengan kondisi pada saat ini. Hanya saja, dengan telah pernah dikeluarkannya Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 *juncto* Ketetapan MPR No V/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No IX/MPR/1978, yang sekarang telah dicabut oleh Ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tampak adanya penyempitan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Ketetapan MPR tersebut ditegaskan bahwa tata urutan perundang-undangan RI adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya ditegaskan bahwa Peraturan atau Keputusan MA, BPK, Menteri, BI, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

Pertanyaan mendasar

Di samping memuat kontroversi tentang kedudukan Perpu yang seharusnya setingkat dengan UU, Ketetapan MPR tersebut juga mengandung masalah tentang kedudukan Peraturan atau Keputusan Menteri. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar—terutama yang dikemukakan oleh para kepala daerah—berkaitan dengan tidak disebutkannya Peraturan atau Keputusan Menteri dalam tata urutan tersebut. Permasalahan ini kemudian "ditutup" dengan surat Menteri Kehakiman dan HAM No M.UM.01.06-27 tanggal 23 Februari 2001 tentang Kedudukan Keputusan Menteri dalam Ketetapan MPR No III/MPR/2000, yang pada intinya menegaskan bahwa para menteri tetap dapat mengeluarkan Keputusan Menteri yang bersifat [illegible]aturan *(regeling)*.

[illegible]ka kita kaitkan dengan Maklumat Presiden 28 Mei 2001 yang lalu, tampak bahwa Ketetapan MPR No III/MPR/2000 tersebut "ketambahan" satu permasalahan lagi, yaitu tentang kedudukan Maklumat dalam tata urutan perundang-undangan RI. Dalam kaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dewasa ini Maklumat tidak dikenal lagi dalam tata hukum Indonesia. Dengan demikian, ia tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalil ini berlaku pula bagi Maklumat yang dikeluarkan Menteri Kehakiman dan HAM Baharuddin Lopa pada tanggal 12 Februari 2001 yang lalu. Khusus untuk Maklumat Lopa, ada keunikan bahwa walaupun Maklumat tersebut dipermasalahkan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, namun di kalangan para hakim dan pegawai departemen tersebut, Maklumat tersebut untuk sementara—cukup ditaati. Apakah Maklumat Presiden 28 Mei 2001 tersebut nantinya juga dapat berlaku dengan efektif, kita tunggu perkembangan yang akan terjadi dalam hari-hari mendatang.

Selanjutnya jika kita telaah materi muatan atau isi Maklumat 28 Mei 2001 tersebut, dapat

kita katakan bahwa ia—terlepas dari kondisi obyektif yang ada—telah masuk dalam kriteria hukum negara darurat (*staatsnoodrecht*). Penulis teringat pernyataan Ketua MA Prof Wirjono Prodjodikoro dalam wawancara khusus dengan Ketua Dewan Redaksi *Suluh Indonesia* pada 11 Juli 1959, atau sekitar enam hari setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, bahwa tindakan Presiden Soekarno mendekritkan kembali UUD 1945 didasarkan pada hakikat hukum tidak tertulis, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *staatsnoodrecht*. Menurut Prodjodikoro, ini berarti bahwa dalam hal ketatanegaraan tertentu dapat dibenarkan adanya tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan ketatanegaraan yang ada.

Namun demikian, dalam konteks keadaan pada saat ini, dapat dikatakan bahwa kriteria *staatsnoodrecht* sebagaimana dikemukakan oleh Prodjodikoro tersebut sebenarnya belum terpenuhi. Dengan demikian, "situasi politik darurat" yang diklaim oleh Maklumat tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi Pr[redacted], dan tidak berlaku bagi [redacted]gan di luar Presiden. Apalagi salah satu hal yang berpotensi untuk menimbulkan keadaan "politik darurat" justru akan ditimbulkan sendiri oleh Presiden, yakni—sebagaimana disebutkan dalam Maklumat tersebut—kemungkinan (diterbitkannya) Dekrit Presiden.

Dengan demikian tidak salahlah jika ada yang menganalisa bahwa Maklumat ini dapat dipergunakan sebagai "jalan pembuka" diberlakukannya Dekrit Presiden, yang kemungkinan penerbitannya justru sudah sering disebutkan sendiri oleh Presiden akhir-akhir ini. Dengan demikian, dengan penerbitan Maklumat tersebut, sebenarnya Presiden sendiri telah membawa—atau setidak-tidaknya telah mengarahkan—situasi negeri ini ke arah keadaan darurat.

Padahal, dari segi filosofis hukum darurat negara, dapat dikatakan bahwa kalaupun keadaan darurat terpaksa diberlakukan, maka sedapat mungkin ha[redacted]lokalisir di wilayah-wila[redacted]ng mengalami masalah saja, seperti ancaman keamanan, bahaya perang, atau hal-hal lainnya yang membahayakan hidup negara.

Dengan demikian tidaklah tepat jika kondisi "bola pa[redacted] perseteruan antara Presiden[redacted]ngan DPR yang—untuk sementara—gagal "dilemparkan" pada Wakil Presiden Mega[redacted] Soekarnoputri, sekarang diamankan risikonya kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pemberlakuan Maklumat tersebut.